

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pendidikan merupakan faktor yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh seseorang dapat menjadi kunci untuk membuka berbagai kesempatan demi memperoleh kehidupan yang lebih baik. Pendidikan akan membuat orang mampu bersaing dalam dunia usaha untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Dengan demikian, pendidikan akan dapat meningkatkan kualitas hidup manusia.

Disamping merupakan aspek yang penting dalam kehidupan individu, pendidikan juga merupakan salah satu komponen yang terpenting untuk kemajuan suatu negara. Negara yang mencapai kemajuan pesat umumnya merupakan negara yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas sebagai hasil dari sistem pendidikan nasional yang bermutu. Dari hasil pendidikan yang bermutu tersebut, pada akhirnya akan dapat dihasilkan manusia-manusia yang cerdas, berkarakter, menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan keadilan sosial (Soedijarto, 2008).

Tingkat bahasa dan literasi yang memadai diperlukan bagi orang dewasa untuk berfungsi di masyarakat, di tempat kerja, dan di rumah. *“Adequate levels of language and literacy are necessary for adults to function in society, at work, and at home”* (To, Tighe, & Binder, 2016: 171). Sehingga pada akhirnya negara tersebut akan mampu menciptakan masyarakat yang tangguh yang mampu bersaing di era globalisasi ini.

Pendidikan sangat penting bagi setiap orang, karena pendidikan merupakan bagian dari hak azasi manusia. Dengan pendidikan maka akan dapat diwujudkan kehidupan bermasyarakat yang lebih adil. Ainscow (2004) menyatakan bahwa dimulai

dari adanya keyakinan bahwa pendidikan adalah hak asasi manusia maka akan menjadi dasar dan landasan bagi kehidupan masyarakat yang lebih adil. Untuk dapat mewujudkan pendidikan sebagai bagian dari hak asasi manusia, maka ada kondisi-kondisi yang harus terpenuhi. Senada dengan itu, Lee (2013) menyatakan bahwa untuk menerima bahwa hak atas pendidikan adalah hak asasi manusia maka dibutuhkan ketetapan akan apa saja yang dapat memenuhi syarat pendidikan, yakni kebebasan pribadi dan perlindungan yang aman yang hendaknya dimiliki oleh setiap individu.

Melihat berbagai peran penting dari pendidikan dalam kehidupan manusia itulah, dan untuk menjamin terlaksananya pendidikan, maka berbagai peraturan di Indonesia dibuat guna mendukung terselenggaranya pendidikan bagi segenap masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kebijakan yang mengatur mengenai hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan, di mana ditegaskan bahwa kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak merupakan hak setiap warga negara. Sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yang merupakan dasar hukum penyelenggaraan sistem pendidikan di Indonesia, di mana dalam salah satu pasalnya, yaitu pasal 31, ayat (1), menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Demikian pula disebutkan pada pasal 28C, ayat (1), setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Walaupun sudah ada berbagai peraturan yang mendukung pengembangan dalam bidang pendidikan, hasil yang dicapai masih belum memuaskan. Dalam ruang lingkup global, peringkat Indonesia dalam indeks perkembangan manusia (*human development index-HDI*) yang dirilis oleh United Nations Development Programme (UNDP) berada pada urutan ke 116 dari 189 negara yang dinilai pada tahun 2017. Posisi ini jauh di

bawah negara tetangga seperti Malaysia yang berada pada urutan ke 57 maupun Brunei Darussalam di urutan ke 39.

Tabel 1.1 Perkembangan HDI negara ASEAN

No	Negara	2016	2017	Peringkat HDI 2016	Peringkat HDI 2017
1.	Singapura	0.930	0.932	8	9
2.	Brunei	0.852	0.853	40	39
3.	Malaysia	0.799	0.802	57	57
4.	Thailand	0.748	0.755	86	83
5.	Filipina	0.696	0.699	111	113
6.	Indonesia	0.691	0.694	115	116
7.	Vietnam	0.689	0.694	116	116
8.	Kamboja	0.576	0.582	146	146
9.	Myanmar	0.574	0.578	148	147

Sumber: United Nations Development Programme, Human Development Indices and Indicators, 2018 Statistical Update, 1 UN Plaza, New York, USA, h. 22-24, 26-28.

HDI merupakan pengukuran yang didasarkan pada tiga dimensi pokok dalam perkembangan kehidupan manusia. Dimensi pertama adalah kemampuan untuk memiliki kesehatan yang baik, yang diukur berdasarkan harapan hidup pada saat lahir. Dimensi kedua adalah kemampuan untuk memperoleh pengetahuan yang diukur berdasarkan rata-rata lama bersekolah dan perkiraan lama menempuh ilmu. Dimensi ketiga adalah kemampuan untuk mencapai tingkat kehidupan yang layak yang diukur berdasarkan pendapatan nasional per kapita. Ketiga dimensi ini kemudian dikalibrasi untuk menghasilkan nilai HDI dengan rentang antara 0 hingga 1. Data di atas menunjukkan bahwa posisi Indonesia dalam HDI perlu mendapat perhatian khusus.

Lembaga internasional lain, yaitu UNESCO juga menekankan akan pentingnya pendidikan. Salah satu programnya adalah yang dikenal dengan program pendidikan untuk semua (*education for all-EFA*). EFA merupakan gerakan internasional yang diprakarsai oleh UNESCO, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi semua orang. Program ini sendiri dimulai pada tahun 1990 dengan tujuan-tujuan yang telah terprogram hingga tahun 2030. Pada tahun 2030, diharapkan bahwa semua orang

telah memperoleh dan memiliki akses untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Untuk mencapai tujuan EFA tersebut, langkah-langkah yang ditempuh diantaranya adalah dengan mengupayakan kesempatan pembelajaran seumur hidup yang merata bagi semua orang, termasuk di dalamnya adalah penyelenggaraan pendidikan kesetaraan.

Mengacu pada berbagai gerakan global yang mendorong terselenggaranya pendidikan untuk perkembangan kualitas kehidupan manusia, maka pemerintah Indonesia pun hendaknya menjadikan pembangunan pendidikan yang konsisten dan berkesinambungan sebagai prioritas utama. Walaupun demikian, keberhasilan dalam menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, bukan hanya semata-mata tanggung jawab pemerintah. Masyarakat dan lembaga-lembaga pendidikan juga harus turut serta berperan aktif dalam rangka perbaikan segenap aspek pendidikan demi realisasi pendidikan yang berkualitas secara optimal.

Sejalan dengan tujuan pendidikan untuk semua, pemerintah Indonesia pun memiliki misi, visi dan tujuan yang sama dalam bidang pendidikan, yaitu menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang menaungi semua satuan dan kegiatan pendidikan demi tercapainya tujuan. Pendidikan untuk semua mengharapkan agar para penyelenggara negara tidak menjalankan praktek diskriminatif dalam memberikan pelayanan pendidikan bagi masyarakat sehingga semua basis komunitas masyarakat dapat terlayani. Basis komunitas yang dimaksud, seperti yang disebutkan dalam pedoman pusat kegiatan masyarakat, adalah basis petani, basis kelautan, basis kehutanan dan perikanan, basis nelayan, basis pedesaan, basis pegunungan, basis bantar kali, basis tenaga kerja, basis anak jalanan, basis peternakan dan basis lainnya.

Hal mana juga dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Disebutkan bahwa Sistem Pendidikan Nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi

dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan. Pada kenyataannya, masih banyak rakyat Indonesia yang belum mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang layak terutama melalui jalur pendidikan formal. Pada umumnya mereka ini adalah orang-orang yang tinggal di daerah-daerah yang sulit dijangkau atau di daerah terpencil.

Melihat akan kebutuhan pendidikan inilah, maka pendidikan tidak dapat hanya dilaksanakan sebatas penyelenggaraan pendidikan formal semata, melainkan juga pendidikan nonformal dan berbagai jenis pelatihan. Dengan demikian penyelenggara pendidikan tidak hanya sekolah-sekolah, tetapi juga pusat kegiatan belajar masyarakat. Melalui pendidikan nonformal inilah, peserta didik yang merupakan warga masyarakat yang kurang mampu, kurang beruntung, putus sekolah, warga masyarakat yang berada dalam usia produktif yang ingin meningkatkan pengetahuan dan kecakapan hidup, dan warga masyarakat yang memerlukan layanan khusus karena berbagai alasan dapat diakomodasi.

Standar kompetensi dan kompetensi dasar program paket C (2008) menyebutkan bahwa disamping meningkatkan mutu pendidikan serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan, disebutkan bahwa pendidikan nasional juga harus mampu menjamin pemerataan kesempatan dalam pendidikan. Tetapi pada kenyataannya, pemerataan kesempatan untuk dapat memperoleh pendidikan yang layak di negara kita masih belum seperti yang diharapkan. Untuk itulah maka diperlukan suatu sistem pendidikan nasional yang bersifat lebih dinamis dan fleksibel sehingga akan dapat dengan cepat pula mengadakan penyesuaian sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan sejalan dengan tuntutan serta kebutuhan masyarakat.

Dengan kondisi yang seperti ini, maka kebijakan pendidikan nonformal merupakan suatu urgensi yang tidak mungkin lagi ditunda kehadirannya berikut aplikasinya di lapangan (Alifudin, 2011).

Yang dimaksud dengan pendidikan nonformal adalah suatu proses pembelajaran yang terjadi secara terstruktur. Proses ini terjadi di luar sistem sekolah atau sistem pendidikan yang formal. Pendidikan nonformal dapat diselenggarakan secara terpisah ataupun dapat pula merupakan bagian penting dari suatu kegiatan yang lebih besar yang dimaksudkan untuk dapat melayani sasaran didik atau peserta didik tertentu dengan sistem belajar yang tertentu pula (Marjuki, 2010).

Kehadiran satuan pendidikan nonformal ini sendiri adalah untuk mendukung lembaga pendidikan formal, agar proses pendidikan dapat terlaksana secara optimal demi tercapainya tujuan pendidikan nasional. Karena seperti disebutkan oleh Rogers (2004: 73), "*non-formal education then was defined as all education outside of the formal system*". Semua pendidikan luar sistem formal adalah pendidikan nonformal, maka sangat tepat bila pendidikan nonformal juga dikembangkan sebagai upaya untuk peningkatan kualitas pendidikan. Pendidikan nonformal berfungsi sebagai pengganti, penambah dan pelengkap pendidikan formal dalam mendukung pendidikan sepanjang hayat maka pelaksanaan jalur pendidikan nonformal dapat menggantikan pendidikan formal dalam perluasan akses pendidikan dasar dan menengah terutama bagi peserta didik yang tidak berkesempatan mengikuti sekolah formal.

Dengan segala upaya untuk memenuhi kebutuhan akan pendidikan serta dalam rangka meningkatkan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi segenap warga masyarakat, maka lahirlah paket-paket pendidikan kesetaraan. Pendidikan paket-paket kesetaraan ini dilakukan dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan, keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional dari para

peserta didik di mana pelaksanaannya diselenggarakan oleh satuan pendidikan nonformal.

Tabel berikut ini, menunjukkan bahwa peserta didik program pendidikan paket A, paket B dan paket C cukup diminati oleh masyarakat yang terkendala ke jalur pendidikan formal, terlihat dari jumlah peserta didik yang mengikuti program paket A, paket B dan paket C, mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Tabel 1.2 Jumlah peserta didik pada jalur formal dan nonformal

Tahun	Jumlah peserta didik					
	SD	Paket A	SMP	Paket B	SMA	Paket C
2016	25.618.078	20.503	10.145.416	123.160	9.342.174	133.427
2017	25.179.893	58.611	9.978.234	196.922	9.866.511	382.904
2018	25.373.265	81.672	10.261.866	247.056	10.347.405	472.884

Sumber:

[http://apkapm.data.kemdikbud.go.id/index.php/cberanda/apkapmsekolah?kode\\_wilayah=000000&tahun=](http://apkapm.data.kemdikbud.go.id/index.php/cberanda/apkapmsekolah?kode_wilayah=000000&tahun=)

Dilihat dari jumlah pelajar paket C tahun 2018, maka dibutuhkan sekitar 15.000 kelas yang masing-masing berjumlah 30 orang. Jumlah ini sesuai dengan yang tertera pada buku program, di mana disebutkan bahwa jumlah peserta didik untuk tiap rombongan belajar adalah 10 hingga 30 peserta didik. Walaupun pemerintah sudah mencanangkan wajib belajar untuk pendidikan dasar, dari tabel di atas, terlihat bahwa semakin meningkatnya jumlah masyarakat yang memilih untuk menempuh pendidikan pada jalur nonformal, yang tercermin dari meningkatnya jumlah peserta didik program paket kesetaraan. Hal ini menunjukkan bahwa program pendidikan paket kesetaraan lebih diminati oleh warga masyarakat. Dengan demikian, sudah selayaknya bahwa program pendidikan paket kesetaraan juga mendapatkan bantuan dan perhatian yang sama dari pemerintah baik dari segi pendanaan maupun pelaksanaannya.

Dalam prakteknya, sejauh ini bantuan yang diberikan untuk program pendidikan kesetaraan masih kurang dari memadai. Berbeda dengan pendidikan formal, pada program pendidikan kesetaraan, tidak semua siswa mendapatkan bantuan pendidikan, sehingga fasilitas sarana dan prasarana yang diperoleh siswa program pendidikan kesetaraan sangat minim bila dibandingkan dengan siswa pendidikan formal. Mengacu pada adanya peningkatan jumlah siswa program pendidikan kesetaraan, maka sudah selayaknya apabila pemerintah meninjau kembali bantuan yang diberikan pada siswa program pendidikan kesetaraan. Demikian pula pelatihan untuk para tutor program pendidikan kesetaraan hendaknya lebih mendapat perhatian, karena karakteristik peserta didik pada pendidikan formal dan nonformal sangat berbeda.

Program pendidikan kesetaraan ini juga diterapkan di negara-negara lain dengan tujuan yang sama, yaitu untuk menjangkau masyarakat yang terkendala ke pendidikan formal. Sejalan dengan program Pendidikan Untuk Semua dan Pendidikan Seumur Hidup, yang dicanangkan oleh UNESCO, maka program pendidikan kesetaraan merupakan salah satu jawaban untuk keberhasilan program-program tersebut.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh UNESCO, menunjukkan bahwa program pendidikan kesetaraan di berbagai negara mengindikasikan keberhasilan program dari segi keberhasilan peserta didik dalam memperoleh ijazah. Sehingga dalam penelitian tersebut juga disebutkan perlunya diadakan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui tingkat keberhasilan program dan hal-hal apa saja yang perlu dilakukan agar penyelenggaraan program dapat lebih baik lagi. Penelitian itu sendiri dilakukan di berbagai negara yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan, yaitu di India (*Open Basic Programme*), Filipina (*the Alternative Learning System*) dan di Thailand (*Equivalency Program*). Dari data statistik yang diperoleh, sejauh ini hanya di Thailand yang menunjukkan bahwa cukup banyak peserta didik program pendidikan kesetaraan



yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan demikian, semakin terbukti bahwa program pendidikan kesetaraan menunjang program pembelajaran seumur hidup.

Program paket pendidikan kesetaraan ini sangat strategis dalam rangka pembekalan kesempatan mendapatkan pendidikan untuk segenap masyarakat. Dalam penyelenggaraannya, program ini terutama diperuntukkan bagi mereka yang putus sekolah karena keterbatasan ekonomi, masyarakat yang bertempat tinggal di daerah-daerah perbatasan, daerah bencana, dan daerah yang terisolir yang belum memiliki fasilitas pendidikan yang memadai bahkan juga bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri dan calon TKI. Dengan kata lain, program pendidikan kesetaraan ini menjaring atau melayani warga masyarakat yang kurang beruntung atau terpinggirkan. Pendapat ini sejalan dengan pengertian pendidikan nonformal seperti yang disebutkan oleh Guilherme dan Morgan (2009), yaitu bahwa sifat pendidikan non-formal, fleksibilitas, pengaturan, organisasi, metode dan tujuan dasar, ditujukan dengan sebaik mungkin untuk menjangkau mereka yang berada di luar ruang lingkup pendidikan formal. *“Given the nature of non-formal education, its flexibility of settings, organization, methods and basic aims, it is well placed to reach those who are, perhaps, outside the scope of formal education.”* Selain itu dukungan untuk penyelenggaraan pendidikan nonformal juga didapatkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Pamela Sud, yang menyatakan bahwa proyek pendidikan nonformal sebenarnya merupakan model yang efektif untuk mendidik anak-anak miskin yang bekerja, dan unsur-unsur pendekatan mereka harus diterapkan pada sistem sekolah formal juga. *“The NFE project is in fact an effective model of educating poor, working children, and elements of their approach ought to be applied to the formal schooling system as well”* (Sud, 2010: 3).

Peserta didik program Paket Kesetaraan tidak dipungut biaya tinggi apalagi uang gedung dan sebagainya. Mereka yang mengikuti program Paket Kesetaraan bisa sambil bekerja karena jadwal pembelajaran bisa sore atau malam hari. Pendidikan kesetaraan dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

Dapat disimpulkan bahwa pendidikan nonformal dengan pendidikan kesetaraan baik paket A, B maupun paket C berperan penting dalam memberikan pendidikan yang dibutuhkan oleh penduduk Indonesia secara umum. Untuk itulah maka evaluasi program ini diperlukan untuk melihat sejauh mana implementasi program di lapangan.

Penelitian ini sendiri difokuskan pada paket C sesuai dengan hasil penelitian awal di mana terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaan program paket C. Dari hasil wawancara dengan wakil kepala seksi bagian kesetaraan, diketahui bahwa permasalahan-permasalahan yang terjadi sehubungan dengan implementasi program paket C antara lain adalah, minimnya regulasi dan kompetensi tenaga pendidik yang belum memadai.

Dari sisi regulasi, berbeda dengan di sekolah formal, pada program paket C sejauh ini yang ada dan dijadikan rujukan hanya regulasi standar isi, standar proses dan standar penilaian pendidikan. Dengan mengacu pada delapan standar pendidikan, tentunya masih banyak standar yang tidak terpenuhi, diantaranya adalah standar sarana dan prasarana serta standar pendidik dan tenaga kependidikan.

Kendala kedua yaitu banyak tenaga pendidik yang belum memiliki kompetensi pedagogi dan andragogi (mengelola pembelajaran nonformal) yang sesuai dengan standar kompetensi dan kualifikasi akademik yang disyaratkan. Kompetensi andragogi yang dimaksud adalah kemampuan tenaga pendidik untuk menciptakan suasana yang kondusif untuk belajar melalui kerjasama dalam merencanakan program pembelajaran,

menemukan kebutuhan belajar, merumuskan tujuan dan materi yang cocok untuk memenuhi kebutuhan belajar, merancang pola belajar dalam sejumlah pengalaman belajar untuk peserta didik, melaksanakan kegiatan belajar dengan menggunakan metode, teknik dan sarana belajar yang tepat dan menilai kegiatan belajar serta mendiagnosis kembali kebutuhan belajar untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya. Dengan kualitas pendidik yang di bawah standar, tentunya akan membawa dampak pada keberhasilan penyelenggaraan program paket C tersebut.

Kendala lain seperti yang disampaikan oleh pengelola salah satu PKBM penyelenggara paket C, adalah mengenai kondisi gedung dan jumlah ruangan. Ruangan yang tersedia kadang tidak cukup untuk menampung seluruh siswa. Selain itu, jumlah buku paket dengan jumlah peserta belum berimbang dan perlunya guru BK (bimbingan dan konseling) karena ada peserta didik paket C yang merupakan murid dari sekolah formal yang dikeluarkan dari sekolah karena bermasalah. Alasan lain yang membuat peneliti tertarik untuk mengevaluasi program paket C adalah adanya berita-berita negatif mengenai program paket C itu sendiri. Tidak dapat dipungkiri bahwa ada pihak-pihak tertentu yang menggunakan program paket C tidak sesuai dengan tujuan dari penyelenggaraan program itu sendiri.

Alasan umum dari para peserta didik yang mengikuti program paket C, adalah tidak ada biaya atau tidak memiliki ijazah. Tetapi program paket C yang tujuan utamanya adalah untuk kesetaraan ini, dalam perjalanannya banyak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Salah satunya yaitu, di mana program paket C ini dianggap sebagai solusi untuk siswa SMA yang tidak lulus Ujian Nasional (UN). Selain itu murid-murid yang dikeluarkan dari sekolah formal karena berbagai alasan seperti membawa/menggunakan obat terlarang atau sering bolos sekolah, dapat dengan mudah mengambil program paket C setelah dikeluarkan dari sekolahnya. Permasalahan lain adalah pada proses belajar

mengajar. Tidak ada monitoring untuk tingkat kehadiran peserta dan tidak ada dokumentasi atas tugas-tugas yang diberikan kepada siswa dalam pembelajaran mandiri.

Penelitian dilakukan atas program paket C dengan beberapa pertimbangan berikut ini. Pertama, pendidikan nonformal sendiri ditujukan untuk orang dewasa. Dalam artikel yang ditulis oleh Bacquelaine dan Raymaekers (2001: 18) disebutkan bahwa yang menjadi target yang paling umum dari pendidikan nonformal adalah orang dewasa. *“Adults constitute the most common target group.”* Kemudian, dari tabel berikut dapat dilihat bahwa kelompok usia 16 tahun keatas, yang dimulai dari pendidikan menengah, memiliki angka persentase putus sekolah (tidak sekolah lagi) yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok umur dibawahnya. Untuk itulah, maka penelitian ini dilakukan pada peserta didik yang berada dalam kelompok umur ini. Di samping itu, juga dapat dilihat pada data statistik dimana angka tidak sekolah lagi baik di kota maupun di desa relatif lebih tinggi pada kelompok umur 16-18 tahun.

Tabel 1.3 Persentase penduduk tidak sekolah di Indonesia

Kelompok umur (tahun)	Persentase penduduk tidak sekolah di Indonesia						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
7 - 12	0,8	0,89	0,75	0,58	0,21	0.17	0.16
13 - 15	12,89	11,37	9,47	8,42	4,89	4.48	4.46
16 - 18	43,07	41,21	37,77	35,31	28,93	28.56	28.38
19 -24	85,03	84,49	82,86	78,82	76,24	76.07	75.30

Sumber: <https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/05/1533/persentase-penduduk-usia-7-24-tahun-menurut-jenis-kelamin-kelompok-umur-sekolah-dan-partisipasi-sekolah-1-2002-2016.html>

Selain angka putus sekolah dan angka penduduk yang tidak bersekolah lagi yang cukup tinggi untuk kelompok umur diatas 16 tahun, dapat dilihat bahwa angka partisipasi sekolah untuk kelompok umur ini juga relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan kelompok umur sebelumnya. Hal ini dikarenakan tingkat pendidikan hingga jenjang

SMP sudah merupakan suatu kewajiban dengan adanya peraturan wajib belajar 9 tahun untuk tiap warga negara. Sehingga kemudian hal ini mengakibatkan angka partisipasi sekolah yang cukup tinggi pada tingkat SD dan SMP sedangkan untuk tingkat SMA agak lebih rendah apabila dibandingkan dengan kelompok umur di bawahnya (Biro Pusat Statistik, 2017).

Pemilihan paket C sebagai program yang dievaluasi dalam penelitian ini, juga berdasarkan pertimbangan persentase angka partisipasi sekolah. Di mana kelompok umur 16 hingga 18 tahun (jenjang sekolah menengah/paket C) memiliki persentase angka partisipasi sekolah yang terendah, seperti tampak pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.4 Persentase angka partisipasi sekolah jenjang SMA/SMK/paket C

Kelompok Umur	Persentase angka partisipasi sekolah						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
7 - 12	97.49	97.88	98.34	98.83	98.57	99.09	99.14
13 - 15	87.58	89.52	90.62	94.32	94.25	94.88	95.08
16 - 18	57.57	60.87	63.64	70.13	70.26	70.83	71.42
19 -24	14.82	16.05	20.14	22.82	22.95	23.93	24.77

Sumber: <https://www.bps.go.id/dynamictable/2015/12/22/104/angka-partisipasi-sekolah-aps-menurut-provinsi-2011-2017.html>

Pemilihan tempat penelitian di wilayah Kabupaten Tangerang dengan pertimbangan bahwa jumlah peserta didik paket C di tempat yang dimaksud pada tahun 2015/2016 merupakan yang terbanyak, dibandingkan dengan daerah lain. Data tersebut diperoleh dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pusat data dan statistik tahun 2016, yang menyajikan jumlah peserta didik mulai dari PAUD, SD, SMP dan MA, termasuk peserta didik program paket A, B dan C. Dimulai sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal, paket A, paket B, dan paket C juga turut diperhitungkan dalam penyusunan statistik pendidikan.

Data berikut ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tangerang menempati urutan pertama untuk jumlah peserta didik program paket C terbanyak, diikuti oleh Kabupaten

Pekalongan, Kota Pasuruan, Kota Jakarta Barat dan Kabupaten Bangkalan, untuk perhitungan tahun 2015/2016. Perhitungan data ini mencakup seluruh provinsi dengan 466 kabupaten/kota yang ada di Indonesia.

Penetapan wilayah Kabupaten Tangerang sebagai tempat penelitian didasarkan pula pada pertimbangan akreditasi program paket C. Kabupaten Tangerang memiliki PKBM (pusat kegiatan belajar masyarakat) sebagai penyelenggara program paket C yang sudah terakreditasi oleh BAN-PNF (Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 menjelaskan bahwa BAN-PNF adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan jalur pendidikan nonformal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

Tabel 1.5 Peserta paket C kabupaten/kota tahun 2015/2016

No	Nama Provinsi	Kabupaten/Kota	Jumlah peserta didik yang mengambil program paket C
1.	Banten	Kabupaten Tangerang	2.728
2.	Jawa Tengah	Kabupaten Pekalongan	2.192
3.	Jawa Timur	Kota Pasuruan	2.184
4.	D.K.I. Jakarta	Kota Jakarta Barat	2.082
5.	Jawa Timur	Kabupaten Bangkalan	2.079

Sumber: APK/APM PAUD, SD, SMP dan SM (2015/2016).

Pada tabel yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional untuk pendidikan nonformal, ada lima PKBM di Kabupaten Tangerang dengan program paket C yang sudah terakreditasi dari jumlah keseluruhan 413 PKBM dengan status sudah terakreditasi hingga Februari 2016. Penelitian dilakukan pada PKBM dengan program paket C yang sudah terakreditasi dimaksudkan untuk kelengkapan data yang dibutuhkan dalam

penelitian. Berdasarkan data-data tersebut, maka peneliti memilih wilayah Kabupaten Tangerang sebagai tempat untuk melakukan penelitian evaluasi program paket C.

## **B. Fokus Dan Subfokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan sebagai fokus penelitian, yaitu Evaluasi Program Pendidikan Kesetaraan pada PKBM penyelenggara program paket C di kabupaten Tangerang. Sedangkan sub fokus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Ruang lingkup, tujuan kebijakan dan sasaran program paket C.
2. Lembaga penyelenggara, peserta didik, tutor dan narasumber teknis, sarana dan prasarana serta materi pembelajaran dan pelatihan program paket C.
3. Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pembiayaan program paket C.
4. Peserta didik yang lulus ujian nasional pendidikan kesetaraan (UNPK) dan eligibilitas pemegang ijazah paket C.

## **C. Perumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah atas evaluasi program paket C, sebagaimana dijelaskan dalam subfokus penelitian di atas, maka dapat dirumuskan masalah dan pertanyaan penelitian berikut ini:

1. Bagaimanakah ruang lingkup, tujuan dan sasaran program paket C?
2. Bagaimanakah komponen-komponen penunjang program paket C yang meliputi lembaga penyelenggara, peserta didik, tutor dan narasumber teknik, sarana dan prasarana serta materi pembelajaran dan pelatihan program paket C?
3. Bagaimanakah perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pembiayaan program paket C?

4. Bagaimanakah tingkat kelulusan program paket C dan eligibilitas pemegang ijazah program paket C?

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian secara umum adalah untuk mendeskripsikan manajemen pembelajaran program pendidikan kesetaraan paket C pada PKBM penyelenggara program pendidikan kesetaraan paket C yang sudah terakreditasi di wilayah kabupaten Tangerang.

1. Manfaat teoritis, kegunaannya adalah untuk dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti terhadap permasalahan yang dievaluasi serta untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan Manajemen Pendidikan pada khususnya, serta sebagai dasar dan referensi untuk penelitian-penelitian lebih lanjut.
2. Manfaat praktis, diharapkan hasil penelitian evaluasi program kesetaraan paket C ini dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:
  - a. Memberikan masukan bagi pemerintah, dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan non formal yang menangani masalah pendidikan kesetaraan program paket C.
  - b. Memberikan masukan bagi penyelenggara program paket C dalam memecahkan berbagai masalah praktis yang dihadapi dalam penyelenggaraan proses pembelajaran dan untuk meningkatkan kualitas manajemen pembelajaran dalam proses belajar mengajar.